



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR.14...TAHUN...2017

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, Pupuk sangat Penting dalam peningkatan produktivitas dan Produksi Komoditas Pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Setoran Pertanian Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani atau kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
7. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

9. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
11. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan Pehutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau budidaya ikan/udang.
13. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
14. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk Budidaya Tanaman Hijauan Makanan Ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan.
15. Pembudidaya Ikan atau Udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
16. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, NPK, ZA dan atau SP 36 di dalam Negeri.
17. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kelompok tani melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
18. Pengecer Resmi adalah penyalur di lini IV sesuai ketentuan peraturan menteri perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
19. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan Produktivitas Usaha Tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani yang merupakan alat pesanaan Pupuk Bersubsidi kepada gabungan Kelompok Tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
21. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati.

BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah tergabung dalam Kelompok Tani menyusun RDKK, dengan ketentuan:
 - a. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura, dan sub sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
 - b. Petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2)

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, Peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III KEBUTUHAN

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai anjuran Pemupukan Berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas dan/ atau realisasi penyaluran tahun sebelumnya/ berdasarkan luas tanam tahun berikutnya ke Dinas Provinsi
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci jenis dan jumlah kebutuhan.
- (3) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan.
- (4) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya Ikan atau Udang berdasarkan (RDKK) yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat.
- (5) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun atas dasar rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi oleh Kelompok Tani sesuai rekomendasi Pemupukan Berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh Petani, Pekebun, Peternak, Pembudidaya Ikan dan/atau Udang.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas.

**BAB IV
(HET) DAN KEMASAN PRODUK
PUPUK BERSUBSIDI**

Pasal 5

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas Pupuk An-organik (Urea, ZA, SP-36, NPK) dan Pupuk Organik.
- (2) Pengadaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Produsen.
- (3) Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati dapat melakukan penyesuaian berdasarkan lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas diwilayah kecamatan/desa masing-masing.

Pasal 6

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca, dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

**Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan**

- (2) Khusus Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna *pink* dan pupuk ZA bersubsidi berwarna *orange*.

Pasal 7

- (1) Pengecer Resmi wajib menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai (HET).
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg
 - b. Pupuk ZA = RP. 1.400,- Per kg
 - c. Pupuk SP-36 = RP. 2.000,- per kg
 - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
 - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (3) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk pembelian oleh Kelompok Tani atau Petani, Pekebun, Peternak, petambak secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 kg
 - b. Pupuk ZA = 50 kg
 - c. Pupuk SP-36 = 50 kg
 - d. Pupuk NPK = 50 kg
 - e. Pupuk Organik = 40 kg
- (4) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Produsen, Distributor Pupuk, dan Pengecer Resmi wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi bagi Petani, Pekebun, Peternak dan Pembudidaya Ikan dan Udang sesuai alokasi yang dibutuhkan.

BAB

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Penyalur di Lini IV.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh penyalur di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompok Tani dan alokasi dimasing-masing kecamatan/desa; dan
 - c. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas melakukan pendataan RDKK di wilayah Daerah, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi ditingkat Petani/ Kelompok Tani dilakukan melalui pendampingan penerapan Pupuk Berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.
- (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Daerah.

BAB V

PENGAWAS DAN PELAPORAN

Pasal 10

Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi, Satuan Kerja Provinsi dan Satuan Kerja Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pihak terkait dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) KPPP di Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendalian

Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-
PHP).

Pasal 12

KPPP wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk
Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana
Tidung.

Ditetapkan di Tana Tidung
pada tanggal..16 Februari 2017
BUPATI TANA TIDUNG,


H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,


H. M. YUSUF BADRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2017 NOMOR 14

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI NOMOR ...14 TAHUN...2017
TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2017

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2017 MENURUT
SUB SEKTOR

| NO | SUB SEKTOR | JENIS PUPUK (TON) | | | | |
|----|--------------------|-------------------|-------|----|-----|---------|
| | | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Organik |
| 1 | Tanaman Pangan | 10 | 3 | 3 | 10 | 8 |
| 2 | Hortikultura | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Perkebunan | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | Peternakan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Perikanan Budidaya | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| | JUMLAH | 20 | 5 | 5 | 20 | 18 |

BUPATI TANA TIDUNG,



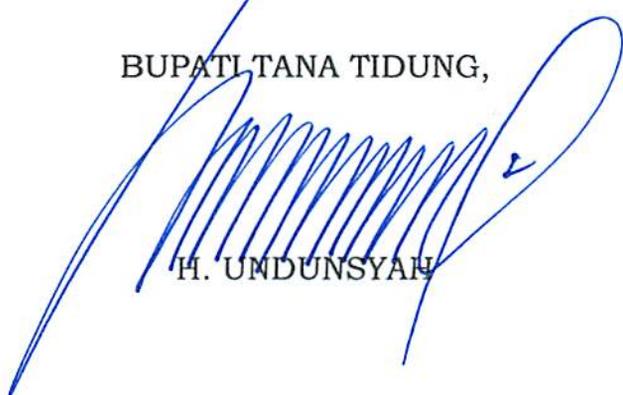
H. UNDUNYAH

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI NOMOR .14.. TAHUN.2017
TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN
HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI MENURUT
JENIS DAN SEBARAN KECAMATAN

| NO | SUB SEKTOR | JENIS PUPUK (TON) | | | | |
|----|---------------|-------------------|-------|----|-----|---------|
| | | Urea | SP-36 | ZA | NPK | Organik |
| 1 | Sesayap | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 2 | Sesayap Hilir | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | Tana Lia | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 4 | Muruk Rian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Betayau | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| | JUMLAH | 20 | 5 | 5 | 20 | 18 |

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH

LAMPIRAN III :
 PERATURAN BUPATI NOMOR 14. TAHUN.2017
 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN
 HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2017 MENURUT SUB SEKTOR,
 JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

| NO | JENIS PUPUK | SETAHUN | (Ton) | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOP | DES | | | |
| 1 | UREA | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SP-36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 3 | ZA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 4 | NPK | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | ORGANIK | 18 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 |
| | JUMLAH | 68 | 16 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |

JENIS PUPUK : UREA

| NO | SUB SEKTOR | SETAHUN | (Ton) | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOP | DES | | | |
| 1 | TANAMAN PANGAN | 10 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | HORTIKULTURA | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | PERKEBUNAN | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | PETERNAKAN | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 5 | PERIKANAN | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| | JUMLAH | 20 | 2.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |

JENIS PUPUK : SP-36

| NO | SUB SEKTOR | SETAHUN | (Ton) | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOP | DES | | | |
| 1 | TANAMAN PANGAN | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | HORTIKULTURA | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | PERKEBUNAN | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |

JENIS PUPUK : ZA

(Ton)

| NO | SUB SEKTOR | SETAHUN | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOP | DES |
|----|----------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 1 | TANAMAN PANGAN | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | HORTIKULTURA | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 3 | PERKEBUNAN | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | JUMLAH | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |

PUPUK : NPK

(Ton)

| NO | SUB SEKTOR | SETAHUN | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOP | DES |
|----|----------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 1 | TANAMAN PANGAN | 10 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | HORTIKULTURA | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | PERKEBUNAN | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 4 | PETERNAKAN | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 5 | PERIKANAN | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| | JUMLAH | 20 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 3 | 0.9 | 0.9 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1.9 |

JENIS PUPUK : ORGANIK

(Ton)

| NO | SUB SEKTOR | SETAHUN | JAN | PEB | MAR | APR | MEI | JUN | JUL | AGT | SEPT | OKT | NOP | DES |
|----|----------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 1 | TANAMAN PANGAN | 8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 2 | HORTIKULTURA | 7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | PERKEBUNAN | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4 | PETERNAKAN | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 5 | PERIKANAN | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | JUMLAH | 18 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 5.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |

BUPATI TANA TIDUNG,



H. UNDUNSYAH